



Government

Akuntansi Pemerintahan

Tim Penulis:

Sri Adella Fitri | Yaya Rahimi Putri | Yulia Zulfina
Julianto Fandra | Fitri Marisa | Annisa Safitri
Halifa Husnah | Yulita Adilah | Intan Asmaul Husna
Rinto Ariadi | Suci Nurfalah | Vivi Syafriyeni
Tiffany Chatarine Putri | Delmeta Sari
Dini Wulandari | Diki Arlanda

Editor : Muhamad Rizal Kurnia

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**Sri Adella Fitri
Yaya Rahimi Putri
Yulia Zulfina
Julianto Fandra
Fitri Marisa
Annisa Safitri
Halifa Husnah
Yulita Adilah
Intan Asmaul Husna
Rinto Ariadi
Suci Nurfalah
Vivi Syafriyeni
Tiffany Chatarine Putri
Delmeta Sari
Dini Wulandari
Diki Arlanda**

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penulis:

Sri Adella Fitri
Yaya Rahimi Putri
Yulia Zulfina
Julianto Fandra
Fitri Marisa
Annisa Safitri
Halifa Husnah
Yulita Adilah
Intan Asmaul Husna
Rinto Ariadi
Suci Nurfalalah
Vivi Syafriyeni
Tiffany Chatarine Putri
Delmeta Sari
Dini Wulandari
Diki Arlanda

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 195**
QRSBN : **62-0115-00437-3**
Terbit Pada : **Juli 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat atas iman, nikmat atas Islam, nikmat Kesehatan yang diberikan, nikmat kelapangan waktu dan kesempatan berharga serta berbagai nikmat lainnya yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibalas. Shalawat dan salam selalu dihaturkan dan tucurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Beliau adalah sosok figur tauladan yang tidak pernah habis keunggulan pribadinya untuk diselami, baik dari semua sikap, semua sifat dan semua praktik dalam keseharian beliau. Beliau adalah sosok sempurna yang tidak bisa tergantikan sampai akhir zaman. Dari beliauulah kita mendapatkan petunjuk indahny Islam dan nikmatnya iman. Untuk Beliau kita berdoa bersama semoga kita mendapatkan syafaatnya di Hari Kiamat nanti.

Alhamdulillah atas terselesaikannya Buku “Akuntansi Pemerintahan” yang berhasil ditulis bersama-sama oleh mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Angkatan 2020 dalam masa perkuliahan Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung terbitnya buku ini, terutama keluarga yang memberikan dukungan penuh, Ibu, suami, anak-anak dan saudara-saudara. Para sahabat dan rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Akuntansi pemerintahan bagian disiplin ilmu akuntansi yang terus berkembang di Indonesia demi penyempurnaan sebagai acuan. Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan implementasi ilmu akuntansi pada bidang *public finance*, terutama untuk tahapan pada pelaksanaan anggaran (*budget execution*), sehingga segala hasil yang ditimbulkan karena bersifat tentatif ataupun permanen/tetap pada setiap tingkatan dan semua unit Pemerintahan. Masyarakat akan meminta transparansi dan menuntut akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara. Peran akuntansi pemerintah merupakan peran penting untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab yaitu: Sejarah Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Konvergensi Akuntansi Pemerintahan; Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Keuangan Negara dan Pencatatannya; Laporan Keuangan Pemerintah; Persamaan Dasar Akuntansi dan Proses Akuntansi Pemerintah; Akuntansi Pendapatan; Akuntansi Belanja; Akuntansi Investasi; Akuntansi Aset Tetap; Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas Dana; Penyesuaian dan Koreksi Kesalahan; Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah; Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

Tujuan dari penulisan Buku ini adalah untuk menambah wawasan mengenai Akuntansi Pemerintahan, sehingga pembaca Buku ini dapat mengenal dan mengetahui lebih banyak dan lebih dalam tentang bagaimana Akuntansi Pemerintahan. Kami menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang konstruktif akan sangat kami tunggu dan kami harapkan. Semua ilmu yang kami miliki adalah ilmu yang baik dan hanyalah berasal dari Allah SWT *Rabb al 'alamin*, tidak ada daya dari diri ini yang *al faqir* atasnya. Semua kesalahan dan semua kekeliruan di dalamnya menunjukkan bahwa betapa terbatasnya ilmu dan kemampuan yang kami miliki. Semoga Buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam pengetahuan tentang Akuntansi Pemerintahan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....	1
Pendahuluan	1
Konsep Akuntansi Pemerintahan	2
Reformasi Akuntansi Dari Masa ke Masa.....	2
Sejarah Akuntansi Pemerintahan	7
Kesimpulan	7
Daftar Pustaka.....	9
Profil Penulis	10
BAB 2 KONVERGENSI AKUNTANSI PEMERINTAHAN	11
Pendahuluan	11
Pengertian Konvergensi Akuntansi Pemerintah	11
Akuntansi Pemerintah.....	13
Peran Akuntansi Pemerintahan.....	14
Perubahan Standar Akuntansi (Konvergensi IFRS).....	15
Tujuan Pemerintah Dan Sifat Akuntansi Pemerintah	16
Standar Akuntansi Pemerintahan.....	17
Prinsip-Prinsip Akuntansi	19
Proses Akuntansi Pemerintah	19
Karakteristik Pemerintah	20
Daftar Pustaka.....	21
Profil Penulis.....	22
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN	23

Pendahuluan	23
Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan	23
Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	24
Lingkungan Akuntansi Pemerintahan	24
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan.....	25
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.....	25
Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, dan Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	26
Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-Prinsip, dan Kendala Informasi Akuntansi	28
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	33
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	36
BAB 4 KEUANGAN NEGARA & PENCATATANNYA.....	37
Pendahuluan	37
Pengertian Keuangan Negara	38
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	39
Pendekatan Keuangan Negara.....	39
Pengelolaan Keuangan Negara.....	40
Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara	41
Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	42
Prospek Hukum Keuangan Negara	43
Pencatatan Keuangan Negara.....	44
Daftar Pustaka.....	46
Profil Penulis.....	47
BAB 5 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	48
Pendahuluan	48

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan.....	49
Entitas Pelaporan dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah	49
Dasar Hukum Laporan Keuangan.....	50
Komponen Laporan Keuangan.....	50
Periode Pelaporan.....	51
Teori Pelaporan Dalam Sektor Publik.....	51
Prinsip Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	52
Ciri-ciri Kualitatif Laporan Keuangan.....	52
Jenis Laporan Keuangan.....	53
Teknik Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	55
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
BAB 6 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI & PROSES AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	59
Pendahuluan.....	59
Persamaan Dasar Akuntansi.....	60
Proses Akuntansi Pemerintahan.....	63
Daftar Pustaka.....	69
Profil Penulis.....	70
BAB 7 AKUNTANSI PENDAPATAN.....	71
Pengertian Akuntansi Pendapatan.....	71
Klasifikasi Pendapatan.....	72
Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan.....	72
Dasar dan Jenis Pendapatan.....	76
Pembagian Pendapatan Pemerintah.....	77
Daftar Pustaka.....	80
Profil Penulis.....	81

BAB 8 AKUNTANSI BELANJA	82
Pendahuluan	82
Pengertian Akuntansi Belanja	82
Klasifikasi Belanja.....	83
Pembagian Klasifikasi Belanja.....	84
Pengakuan dan Pengukuran Belanja.....	88
Penyajian dan Pengungkapan Belanja.....	89
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	93
BAB 9 AKUNTANSI INVESTASI	94
Pengertian Akuntansi Investasi	94
Investasi di dalam Akuntansi Pemerintahan.....	95
Bentuk Investasi.....	95
Klasifikasi/kelompok Investasi.....	96
Pengakuan Investasi.....	98
Pengukuran Investasi	99
Metode Penilaian Investasi	99
Pengakuan Hasil Investasi.....	101
Pelepasan dan Pemindehan Investasi.....	103
Daftar Pustaka.....	104
Profil Penulis.....	105
BAB 10 ASET TETAP	106
Pendahuluan	106
Tanah.....	107
Peralatan dan Mesin.....	110
Gedung Dan Bangunan.....	114
Jalan, Irigasi dan Instalasi Jaringan	118
Aset Tetap Lain-lain.....	120

Daftar Pustaka.....	121
Profil Penulis.....	122
BAB 11 AKUNTANSI KEWAJIBAN & EKUITAS DANA.....	123
Pendahuluan	123
Akuntansi Kewajiban.....	123
Klasifikasi Kewajiban.....	124
Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban.....	124
Kewajiban Jangka Pendek.....	125
Kewajiban Jangka Panjang	128
Perubahan Valuta Asing	129
Penghapusan Utang.....	129
Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban.....	129
Ekuitas Dana.....	130
Klasifikasi Ekuitas Dana	131
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis.....	134
BAB 12 PENYESUAIAN & KOREKSI KESALAHAN.....	135
Pendahuluan	135
Penyesuaian.....	136
Koreksi Kesalahan.....	138
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis.....	147
BAB 13 PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH.....	148
Keuangan Negara.....	148
Indikator Materi	149
Pengertian Penganggaran dan Anggaran.....	149
Jenis-Jenis Anggaran.....	149
Sistem Anggaran Negara.....	152

Penganggaran Pemerintah Daerah	154
Siklus Anggaran Pemerintah Daerah	156
Pelaksanaan APBN dan APBD.....	157
Perubahan APBN.....	158
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban	159
Daftar Pustaka.....	160
Profil Penulis.....	161
BAB 14 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT & DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.....	162
Pendahuluan	162
Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	163
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	163
Perkembangan Sistem Akuntansi Pusat	165
Karakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	166
Klasifikasi SAPP	167
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	171
Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	174
BAB 15 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH & DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.....	175
Pendahuluan	175
Lingkup Akuntansi Dana Daerah.....	176
Akuntansi Keuangan Daerah.....	177
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	177
Pelaksanaan dan Perwujudan Anggaran.....	178
Struktur Laporan Realisasi APBD	179
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	180
Penyusunan Laporan Keuangan Skpd	181

Daftar Pustaka.....	183
Profil Penulis.....	184
BAB 16 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN .	185
Pendahuluan	185
Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	185
Pengertian Sistem Pengendalian Internal	186
Prinsip dan Asas SPIP	186
Faktor Pengendalian Internal dalam PP No. 60 Tahun 2008 Terkait Sistem Pengendalian Pemerintah	187
Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	189
Keterbatasan Pengendalian Internal.....	190
Langkah untuk Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	191
Kelemahan dari Sistem Pengendalian Pemerintah	192
Prioritas Penerapan SPIP Unit Mandiri.....	193
Daftar Pustaka.....	194
Profil Penulis.....	195

BAB 1

SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Fondasi merupakan tumpuan beban pada sebuah konstruksi yang sedang dibangun, dengan kata lain fondasi adalah faktor penting sebagai tumpuan beban bidang pada bangunan. Terdapat berbagai struktur dalam konstruksi yang merupakan sebuah objek bangunan sebelum menjadi bangunan yang utuh. Sedangkan fondasi adalah struktur dasar dari konstruksi bangunan sangat memiliki peran yang penting, karena sumber kekuatan dari sebuah bangunan berasal dari fondasi tersebut. Keberhasilan akan diperoleh dalam pelaksanaan konstruksi, jika perencanaan yang matang juga menjadi perhatian secara jelas dan terperinci seperti metode untuk menentukan pembangunan, biaya yang dikeluarkan, keselamatan para pekerja, dan lain sebagainya.

Jika diibaratkan sebuah negara, Konstruksi dapat dianalogikan sebagai sistem pemerintahan, jika dianalogikan pada sebuah negara, dengan sistem birokrasi sebagai fondasinya. Kata “birokrasi” berasal dari bahasa Inggris, yang berarti *bureau* dan *cracy* dapat diartikan sebagai organisasi dengan pola rantai komando yang berbentuk piramida sebagai struktur dasarnya, artinya pengelolaan organisasi secara teratur dan jelas melalui suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah dirancang.



Gambar 1.1 Reformasi Akuntansi dari Masa ke Masa

Sumber: diolah penulis

Tahapan fase akuntansi pemerintahan di Indonesia

1. Tahun 1945

Tahun 1945 merupakan kemerdekaan negara menjadi negara Republik Indonesia, tahun 1945 ditunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya hanya mengacu pada aturan Pemerintah Belanda yaitu “*Indische Comptabiliteitswet (ICW)*.”

2. Tahun 1967

Pada Tahun 1967 laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan negara pertama kali disusun dan disahkan Undang-undang.

3. Tahun 1975

Tahun 1975 sistem akuntansi belum dimiliki, hanya sistem administrasi atau sistem tata usaha keuangan yang telah ada pada saat itu.

4. Tahun 1979 s/d Tahun 1980

- a. Segala administrasi keuangan pemerintahan dilakukan secara manual dan masih belum tersistem, tidak ada integrasi antar sistem dan tidak ada sistem yang terkomputerisasi pada masa itu.

yang telah ditetapkan ditunjang dengan dikembangkannya sistem akuntansi yang terintegrasi dan terkomputerisasi.

Pada era saat ini, sistem akuntansi yang telah mengadopsi standar internasional yaitu *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) diharapkan membawa pengelolaan keuangan negara ke arah yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Arinta, Kustadi. (1996). *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar, Arif dkk. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, Revrisond. (2005). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF
- Hamzah dan Kustiani. (2014). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: STAN Press
- Kementerian Keuangan. 2018. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PROFIL PENULIS



Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.

Ketertarikan penulis mendalami akuntansi pemerintahan dimulai pada tahun 2008 silam. Hal ini disebabkan karena penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 2 dengan memilih keilmuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan. Penulis memiliki keilmuan dibidang Akuntansi, melalui pendidikan formal S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Andalas dan S2 pada Program Pascasarjana, program studi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Andalas. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang ilmu tersebut, dan melakukan berbagai pengabdian di bidang ilmu akuntansi. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Agama. Selain meneliti dan melakukan pengabdian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: sriadellafitri1234@gmail.com

BAB 2

KONVERGENSI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Yaya Rahimi Putri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Akuntansi merupakan suatu ilmu bisnis, yang mulanya ada di tempat lingkungan bisnis. Karena banyaknya orang yang bekerja di bidang bisnis maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang keuangan. Akuntansi kemudian berkembang untuk suatu entitas yang tujuannya selain profit. Akuntansi bagi masyarakat sangatlah penting karena sebagai penghubung komunikasi antara penyedia dan pengontrol sumber daya. Entitas nirlaba juga memerlukan akuntansi dan menerapkan prinsip akuntansi untuk mempermudah bisnisnya, seperti: pemerintah, yayasan, dan entitas nirlaba lainnya.

Menurut Lili Sadel (2015), akuntansi pemerintahan termasuk dalam akuntansi nirlaba dan akuntansi lembaga, yang titik fokusnya pada pencatatan, mengidentifikasi dan segmen pemerintah untuk melaporkan transaksinya.

Pengertian Konvergensi Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi bahwa biasanya akuntansi pemerintah dibuat oleh suatu badan standardisasi independen kemudian disahkan oleh peraturan pemerintah, setelah memperoleh dari banyak penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Konvergensi Akuntansi Pemerintahan

- a. Pelaporan entitas
- b. Dalam menyusun laporan keuangan harus didasari pada entitas akuntansi
- c. Penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar pengukuran
- d. Kebijakan-kebijakan akuntansi disesuaikan
- e. Semua ketentuan akuntansi diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Karakteristik Pemerintah

Entitas yang *profit-oriented*, memiliki tujuan yakni menyiapkan atau menjual barang atau jasa, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan dirasakan bagi para pemilik atau anggota. Asal mula pendanaan diberi oleh investor, kreditur, dan anggota. Sementara itu, pemerintah dan organisasi *non-profit* mempunyai misi yang tidak sama dari entitas bisnis. Misi pemerintah dan organisasi nirlaba ialah memberikan pelayanan, memajukan kesejahteraan publik. kebanyakan asal dana didapatkan oleh pemerintah dan organisasi *non-profit* berasal dari pajak, donasi atau sumbangan, utang, dan keuntungan perusahaan negara.

Kerap kali sulit untuk menilai besarnya relatif dari laba. manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat secara proporsional. Pemerintah memiliki tugas untuk mengembangkan perekonomian manajemen yang mengelola keuangan negara. Dan mempunyai tanggung jawab atas pemilikan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat sebagai pembayar wajib pajak, donatur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan, Pada setiap negara, ruang lingkup pemerintahan dan organisasi nirlaba tidak sama dan tidak ada definisi yang sesuai dan komprehensif untuk semua sistem pemerintahan di setiap negara. Namun yang pasti pemerintah dan organisasi *non-profit* di setiap negara memiliki koneksi dan peran yang besar dalam pelayanan masyarakat umum. Misalnya, di negara Amerika Serikat pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu: *general purpose governments* dan *special purpose governments*.

Daftar Pustaka

- Deddi Nordiawan, Iiswahyudi Soni Putra, Maulidah Rahmawati, Akuntansi Pemerintahan, (Jakarta : Salemba Empat, 2007)
- Lili sadeli, Dasar-dasar Akuntansi. Edisi Pertama, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015)
- Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta : PT Indeks, 2008)
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres

PROFIL PENULIS



Yaya Rahimi Putri

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2018 silam. Hal tersebut muncul keinginan penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan berhasil lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi untuk melanjutkan ketertarikannya terhadap bidang akuntansi dan berhasil diterima pada studi S1 di prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2020. Dua tahun kemudian, penulis lebih mendalami bidang akuntansi, agar lebih paham tentang akuntansi.

Buku ini merupakan pengalaman perdana penulis dalam bidang menulis buku. Selain itu, penulis ingin aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: yarahimiputri3y@gmail.com

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Yulia Zulfina

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 berperan sebagai prinsip untuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, pihak yang menata laporan keuangan, auditor, serta pengguna informasi finansial kala memecahkan solusi atas suatu permasalahan yang belum ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual dapat dipahami sebagai perumusan gagasan mendasar yang terlibat dalam pengumpulan dan penyajian data keuangan pemerintah. Dalam permasalahan akuntansi yang belum memiliki solusi dalam pedoman akuntansi pemerintah, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai panduan.

Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan bermuatan item berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan:

1. Tujuan kerangka konseptual
2. Lingkungan akuntansi pemerintah
3. Pengguna serta persyaratan informasinya
4. Entitas akuntansi serta entitas pelapor
5. Peran dan tujuan pelaporan keuangan, komponennya, serta landasan hukumnya

historisnya dikenal sebagai pengukuran, menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset bisa dicatat sebesar biaya perolehan, menggunakan sumber energi ekonomi, ataupun sebesar nilai pasar dari pertimbangan yang diserahkan. Berlainan dengan aset, kewajiban diakui sebesar nilai wajar sumber energi ekonomi yang dipakai oleh pemerintah buat memenuhi kewajiban yang berlaku.

Saat mengidentifikasi komponen pelaporan keuangan, faktor-faktor berikut harus diperhitungkan:

1. Pengakuan Aset

Ketika potensi aset untuk keuntungan ekonomi masa yang akan datang terealisasi dan nilainya bisa ditentukan dengan akurat, aset tersebut diakui. Piutang diklasifikasikan sebagai aset ketika hak untuk meminta infus tunai atau manfaat ekonomis yang lain dari entitas lain sudah atau akan dipenuhi dan nilai wajar dapat diukur atau didekati. Titik pengakuan membutuhkan pengaturan yang lebih rumit untuk aset yang diperoleh pemerintah yang berbentuk uang tunai.

2. Pengakuan Kewajiban

Kala anggaran pinjaman diperoleh serta kewajiban muncul, kewajiban diakui.

3. Pengakuan Pendapatan

Kala hak atas pemasukan atau pendapatan timbul ataupun terdapat gerakan masuk sumber energi ekonomi, pemasukan LO diakui. Kala uang tunai diperoleh di rekening Kekayaan Biasa negeri bagian ataupun wilayah, pemasukan LRA diakui.

4. Pengakuan Beban serta Belanja

Beban dicatat pada dikala liabilitas diperoleh, asset dikonsumsi, ataupun terjalin penyusutan nilai ekonomi maupun kemampuan pelayanan. Sebaliknya pengeluaran dicatat bersumber pada terbentuknya pengeluaran dari rekening kas biasa negara serta daerah.

Daftar Pustaka

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

PROFIL PENULIS



Yulia Zulfina

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2022. Penulis menempuh pendidikan awal di TK Tunas Harapan Ladang Laweh. Lalu penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 34 Ladang Laweh, lalu melanjutkannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Lintau Buo, dan penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah atas di SMA N 1 Lintau Buo Utara. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di salah satu Universitas Islam yang Berada di Tanah Datar yaitu tepatnya di Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar. Di UIN ini penulis mengambil mata kuliah Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh pendidikan di UIN Mahmud Yunus batusangkar penulis termasuk aktif di salah satu organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah. Dan juga Penulis aktif di berbagai kegiatan kepanitiaan yang diselenggarakan oleh Program Studi maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Salah satu hal yang membuat penulis tertarik dalam menulis khususnya buku ini adalah pada awal mata kuliah akuntansi pemerintahan. Dimana Buku ini adalah buku pertama yang penulis tulis dalam perjalanan penulis menuju sarjana. Dalam hal ini penulis berharap agar buku ini dapat membantu teman-teman dalam mata kuliah yang teman-teman ikuti.

Email Penulis: yuliazulfina@gmail.com

BAB 4

KEUANGAN NEGARA & PENCATATANNYA

Julianto Fandra

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Akuntansi Pemerintahan belum seperti sekarang yang berkembang dan dipakai. Pada masa itu, akuntansi pemerintahan yang dipakai bersifat manual atau dengan pencatatan tunggal dengan menggunakan *Cash Basis*. Pencatatannya pun masih secara sederhana sedangkan buku-buku yang digunakan antara lain seperti Buku Bank, Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai.

Alasan kenapa di awal-awal kemerdekaan memakai sistem akuntansi pemerintahan ini karena sistem ini mudah digunakan, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membuatnya serta SDM yang menggunakan sistem ini tidak harus profesional juga.

Akuntansi pemerintahan memiliki dasar hukum pada akhir tahun 2033 yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai pengganti produk Belanda. Yang akhirnya menjadi pijakan dalam perkembangan akuntansi pemerintahan Indonesia. Beberapa bulan setelah dibentuknya UU tersebut pemerintah Indonesia juga membentuk UU NO. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara.

Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia membentuk undang-undang baru yaitu UU NO. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan tujuan untuk menjadi tonggak reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia.

ada dilingkungan daerah atau pusat sekalipun yang wajib membuat laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini dalam pelaporannya dinyatakan dalam bentuk PSAP dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Pengakuan item-item dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual :

- a. Pada saat manfaat ekonomi diperoleh maka pendapatan diakui
- b. Pengakuan investasi
- c. Aktiva tetap
- d. Konstruksi dalam pengerjaan
- e. Kewajiban

Kelebihan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual:

- a. Informasi yang didapatkan akan lebih handal dan terpercaya karena pendapatan dan beban diakui saat transaksi
- b. Setiap akun dicatat sesuai akun masing-masing
- c. Akun kas yang belum diterima berpotensi meningkatkan pendapatan
- d. Dalam menentukan kebijakan pemerintah dapat berpedoman pada laporan keuangan
- e. Laporan keuangan setiap periode dapat dibandingkan dengan entitas-entitas yang ada.

Kekurangan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual :

- a. Setiap akun kas yang belum terbayar dapat mengurangi pendapatan
- b. Adanya kemungkinan resiko yang muncul jika kas tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan
- c. Akun kas yang belum dibayarkan, tidak tahu kapan kas itu dapat diterima

Macam-macam laporan berdasarkan PP No.24 tahun 2005:

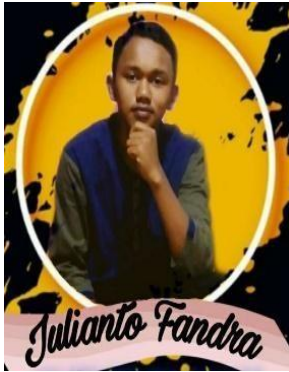
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Entitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Daftar Pustaka

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A.(2020). Pengelolaan Keuangan Negara. Journal Of Management (SME's) Vol. 12, No.2, p203-214.
- Djafar, S. (2008). Hukum Keuangan Negara. Rajawali Pers. Enas. (2021). Keuangan Negara. Widina.
- Hasanah, F. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: In Media. Riawan, T. (2006). Hukum Keuangan Negara. Grasindo.
- Sutedi. (2022). Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Julianto Fandra

Penulis dilahirkan di Sungai Tarab, 18 Juli 2002, anak dari Ayah Afrianto dan Ibu Salvira Andriani. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Pendidikan awalnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Tanah Datar, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 8 Tanah Datar tahun 2014, setelah itu melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanah Datar dan menamatkan MA tahun 2020. Penulis mulai meminati ilmu akuntansi sejak berada di kelas 12 MA. Hal tersebut yang membuat penulis memilih jurusan akuntansi syariah di dunia perkuliahan. Awal perkuliahan tahun 2020, penulis memulai perkuliahan yang berkaitan dengan jurusan akuntansi yang pada masa-masa sekolah, penulis tidak pernah mempelajari ilmu akuntansi ini. Pada tahun 2020 itu juga masa pandemi covid-19, maka dunia perkuliahan saat itu tidak bertemu langsung melainkan dengan media digital seperti zoom dan gmeet.

Aktivitas sehari-hari menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang tahun ini semester 6 dan juga aktif sebagai seorang aktivis kampus dengan organisasi LDK dan UKK Pramuka. Penulis memiliki cita-cita sebagai seorang akuntan yang profesional di masa depan. Disamping itu penulis juga memiliki hobi menulis, dan berharap dapat memberikan dampak positif baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi Agama, bangsa dan negara tercinta. Adapun kontak yang bisa dihubungi No. HP: 082286886120 atau email penulis: Juliantofandra18@gmail.com.

BAB 5

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Fitri Marisa

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Dengan adanya transformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta adanya tuntutan sosial, pengelola pemerintahan semakin terdorong untuk bekerja lebih baik lagi. Terkait hal itu, pemerintah saat ini dituntut untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang pengelolaan keuangannya.

Keterbukaan informasi publik tertuang dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sesuai dengan kewenangannya, badan publik diwajibkan oleh undang-undang ini untuk menyediakan, memberikan, atau mengumumkan informasi publik. Entitas publik memiliki hak untuk meminta laporan keuangan karena merupakan barang publik yang berhak diperoleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan informasi keuangan berupa laporan keuangan untuk jangka waktu tertentu. Secara umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, organisasi pemerintah menawarkan layanan kepada penduduk sesuai dengan bidangnya masing-masing. misalnya, fasilitas medis, sekolah, dan sebagainya. Organisasi pemerintahan membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan kewajibannya.

Laporan Keuangan Pemerintah

dengan menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi dan memberikan gambaran kronologis.

2. Langkah Pengikhtisaran

Setelah pencatatan dan pengelompokan transaksi dalam jurnal, transaksi tersebut diringkaskan dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar dalam jangka waktu tertentu. Buku besar terdiri dari buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum digunakan untuk mengumpulkan data transaksi dan mengklasifikasikan mereka untuk divalidasi, mencatat penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan keuangan. Buku besar pembantu membantu dalam penyusunan laporan keuangan karena mengurangi kesalahan dalam buku besar umum.

3. Langkah Pelaporan

Data yang tercatat dalam rekening buku besar disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Proses penyederhanaan penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja. Ada dua sistem pencatatan dalam akuntansi: *single book entry* dan *double book keeping entry*. *Single book entry* hanya melibatkan satu buku besar untuk mencatat transaksi, sedangkan *double book keeping entry* melibatkan lebih dari satu akun buku besar untuk mencatat transaksi.

Daftar Pustaka

- Arifuddin, H. d. (2018). *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. UNDIP Press.
- Hasanah, N. d. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Pamukas, B. d. (2013). Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (Studi kasus pada sekolah menengah kimia Bogot). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Rusmana, O. d. (2017). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Yuesti, A. d. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali indonesia: CV. Noah Aletheia.
- Yuliani S, d. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi AKuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*.

PROFIL PENULIS



Fitri Marisa

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2018 silam. Hal tersebut muncul ketika penulis menduduki bangku kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan tujuan agar minat penulis terhadap ilmu akuntansi tersalurkan dan alhamdulillah penulis berhasil diterima pada studi S1 di prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2020.

Pada saat ini penulis sedang mencoba pengalaman baru yaitu membuat suatu karya berupa buku, yang mana ini merupakan pengalaman pertama penulis dalam menulis. Selain itu penulis juga memiliki harapan agar dengan adanya buku ini maka dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Semoga buku ini berguna sebagai referensi bagi penulis selanjutnya.

Email : fitrimarisa54@gmail.com

BAB 6

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI & PROSES AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Annisa Safitri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Akuntansi, merupakan ilmu yang awalnya di kembangkan pada lingkungan bisnis. Mengapa demikian, karena dalam dunia bisnis orang sangat memerlukan informasi yang bersifat keuangan dan juga menjadi tingkatan yang paling penting bagi pengguna informasinya. Pada akhirnya pemerintah juga menggunakan akuntansi yang bertujuan selain memperoleh laba atau keuntungan. Dari hal ini disadari bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam memudahkan komunikasi bagi penggunannya. Pemerintah yang merupakan lembaga *non profit* juga menggunakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.

Menurut pendapat Sadat (2020) mengatakan Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.

Akuntansi pemerintah menjadi sangat penting, karena keuangan yang dikelola pemerintah akan semakin besar maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai bentuk transparansi keuangan dalam pemerintahan.

**Tabel 6.10. Dinas Pertamanan dan Tata Kota, Kabupaten
Sejahtera
Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian**

Kode Akun	Akun	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan	20.000.000	
	Kas di bendahara Pengeluaran	15.000.000	
	Piutang Pajak Daerah	16.000.000	
	Kendaraan Dinas	25.000.000	

Sumber : diolah penulis

5. Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan salah satu hal penting dalam penggunaan basis akrual. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian nilai pelaporan keuangan sama dengan keadaan pada saat tanggal pelaporan.

6. Neraca Saldo setelah Penyesuaian

Proses setelah Penyesuaian yaitu Neraca saldo setelah penyesuaian yang mana didalamnya berisikan akun-akun yang disesuaikan yang mana akan menjadi dasar utama untuk menyiapkan Laporan Keuangan.

7. Jurnal Penutup

Jurnal penutup pada akuntansi pemerintahan ada dua yaitu jurnal penutup LO dan Jurnal Penutup LRA. Pencatatan yang sifatnya kontra dari pencatatan surplus/defisit LO merupakan pengertian dari jurnal penutup LO, sedangkan jurnal yang digunakan untuk menutup perkiraan akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Anggaran merupakan pengertian jurnal LRA.

8. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang disusun secara terurut terkait posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entit. Jadi laporan keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas pada suatu entitas.

Daftar Pustaka

- Effendi,S.(2021).*Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Batam. CV Batam Publisher
- Rusmana, O., Dyah,S., Yuliansyah., Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sadat,A.(2020). *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.

PROFIL PENULIS



Annisa Safitri

Penulis lahir di Solok, 21 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dan sekarang menetap di Desa Sulit Air. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 10 Ganting Bigau Sulit Air pada Tahun 2014 dan melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Koto Diatas, Sulit air dan tamat tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Singkarak dan tamat pada tahun 2020. Sekarang penulis sedang menempuh studi strata satu semester 6 di Universitas Mahmud Yunus Batusangkar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan mengambil jurusan Akuntansi Syariah. Penulis memiliki hobi membaca, dan selama kuliah ini penulis lebih memfokuskan kepada kuliah.

Email Penulis: annisasafitri20000@gmail.com

BAB 7

AKUNTANSI PENDAPATAN

Halifa Husnah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Akuntansi Pendapatan

Pendapatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah arus masuk bruto, dari laba ekonomi yang timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan dalam suatu periode, jika arus masuk tersebut mempengaruhi peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi investasi dalam bentuk saham atau modal.

Pendapatan adalah hasil dari aktivitas operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Penghasilan penting karena mereka adalah objek bisnis, karena pendapatan berasal dari perekonomian, termasuk penjualan barang, jasa dan pemakaian aset entitas oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga, deviden maupun royalti.

Pendapatan berasal dari pemberian barang dagang, pemberian jasa, yang dilihat dari nominal nilai yang dimasukkan ke dalam beban pelanggan dan langganan atas klaim produk dan juga jasa yang disediakan suatu entitas bagi pengguna. Golongan dari pendapatan dibagi dua:

1. Penghasilan Bisnis

Penghasilan wirausaha atau bisnis, yaitu nilai nominal atau hasil dari kegiatan operasi pokok yang dilakukan oleh suatu perusahaan berbentuk pemberian produk dan pemberian jasa.

2. Penghasilan Non Bisnis

Penghasilan non bisnis merupakan nilai yang didapat di luar bisnis inti suatu bisnis dengan meningkatkan pendapatan bisnis, contoh penghasilan jasa giro dan keuntungan bunga. (Calvin Liawan, 2019).

Klasifikasi Pendapatan

Pengklasifikasian pendapatan memudahkan pembaca dan pengguna laporan keuangan untuk mengerti isi laporan keuangan yang disajikan, pengklasifikasian tersebut dengan jelas menunjukkan besaran nominal pendapatan untuk setiap usaha yang dijalankan oleh pebisnis. Metode *cash to accrual* PP 24 yang berlaku untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia Tahun 2005 mengklasifikasikan penghasilan menurut lokasi kejadian dan macam penghasilan.

1. Pemerintah Pusat

- a. Penerimaan pajak, yaitu nilai nominal penerimaan pemerintah pusat dari pajak yang diperoleh dari pajak dalam dan luar negeri serta pajak perdagangan internasional yang terjadi.
- b. penghasilan negara non pajak, yaitu penerimaan pemerintah pusat dari luar perpajakan.
- c. Penerimaan hibah, yaitu penerimaan pemerintah pusat berupa uang, produk, jasa, atau surat berharga hasil pemberian, tidak harus dikembalikan.

2. Penghasilan Pemerintah Daerah

- a. Penghasilan bersumber daerah, yaitu pendapatan daerah yang hanya berasal dari daerahnya sendiri.
- b. Penghasilan transfer yaitu, hasil dari pembayaran berupa transfer negara dengan maksud untuk mencapai tujuan ekonomi daerah.
- c. Pendapatan lain nan sah, yaitu penghasilan yang tidak bisa dibagi menjadi pendapatan wilayah sumber dan penghasilan transfer.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

1. Pengakuan Pendapatan

Semua usaha akhirnya akan memiliki tujuan untuk menghasilkan penghasilan yang meningkatkan pandangan perusahaan. Pendapatan dapat diakui secara umum saat:

- a. Perolehan (*earned*)

Saat entitas secara substansial memenuhi kewajibannya, penyelesaian obligasi, jika proses terselesaikan maka menjadi penghasilan.

Daftar Pustaka

- Hartiyah, S. (2014). *Teori Akuntansi Konsep Akuntansi Pendapatan*, Jurnal PPKM II, 84-85.
- Hasanah, N. & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*, Bogor, Indonesia: In Media, 119.
- KSAP. (2016). *Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan*, Buletin Teknis Nomor 23, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 4-5.
- KSAP. (2016). *Akuntansi Pendapatan Perpajakan*, Buletin Teknis Nomor 24, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 4-7.
- Liawan, Calvin. & Harling, S. (2019). *Analisis Akuntansi Pendapatan Jasa Konstruksi Pada PT. Agrindo Makmur Abadi*. Sociedad, 2(1), 2-3.

PROFIL PENULIS



Halifa Husnah

Penulis memiliki ketertarikan akan penulisan sebuah buku yang mana hal tersebut membuat penulis memilih masuk Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Lintau Buo Utara dengan memilih Jurusan IPS karena penulis juga memiliki ketertarikan akan sejarah yang pernah ada dan lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi hingga sekarang dimana penulis tengah berada di semester akhir dengan program studi Akuntansi Syariah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan karya dalam bentuk buku yang mana penulis memiliki kesempatan dalam mata kuliah akuntansi pemerintah untuk bergabung dalam penulisan sebuah buku dengan dibimbing oleh dosen yang mengampu mata kuliah akuntansi, yang mana buku tersebut akan diterbitkan dan dapat dimanfaatkan bagi pengguna yang membutuhkan. Dengan kesempatan yang ada ini penulis memiliki harapan akan adanya kesempatan-kesempatan lainnya untuk menulis sebuah buku dan menerbitkannya yang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga masyarakat

Email Penulis: halifahusnah28@gmail.com

BAB 8

AKUNTANSI BELANJA

Yulita Adilah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Peraturan umum teknis tentang belanja pemerintah yang digunakan di kala ini mengacu terhadap dasar-dasar aturan sudah diresmikan, yaitu *International Public Sector Accounting Standards*, PP No. 71, 2010 mengenai Standar akuntansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.05/2016 mengenai pergantian menjadi PMK 219/PMK.05/2013 mengenai strategi Akuntansi Pemerintahan Pusat. Ada pula telah teratur yaitu mulai dari pengertian, pembagian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sampai contohnya permasalahan.

Pengertian Akuntansi Belanja

Berdasarkan SAP Nomor 2, belanja ialah seluruh biaya yang asalnya didapat pada rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan didapat pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja di area akuntansi komersial bisa diartikan menjadi arus keluar dari aset ataupun seluruh wujud pemakaian aset yang terjalin sepanjang tahun tertentu asalnya pada penciptaan barang, pemberian jasa, ataupun kegiatan lainnya telah berlangsung.

Berdasarkan Dewan Prinsip Akuntansi pernyataan No. 4, belanja diartikan selaku kuantitas, terukur dalam nominal, pada kas yang dikeluarkan ataupun properti lainnya telah dikirim, modal saham yang dikeluarkan, jasa diberi, ataupun keharusan terjalin dan berhubungan atas barang dan jasa baik sudah ataupun yang akan masuk.

Keterangan lebih mengenai belanja tersaji dalam halaman depan laporan keuangan yang harus diungkap pada CaLK sebagai berikut:

- a. Rincian belanja berdasarkan fungsinya dan pembagian belanja berdasarkan fungsinya dipakai yang bertujuan dalam keserasian serta terpadunya kelola keuangan negara, bisa berbentuk Laporan Kinerja, yang telah tercantum dalam PP No. 8, 2006 mengenai Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi dan Pemerintah
- b. Rincian belanja berdasarkan agenda dan aktivitas disamakan pada kepentingan pemerintah dan sebagai kekuasaan daerah (Permendagri no. 13, 2006)
- c. Rincian belanja berdasarkan kepentingan pemerintah, terbagi menjadi belanja kepentingan wajib dan belanja kepentingan pilihan
- d. Rincian belanja berdasarkan belanja langsung serta tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Asian Development Bank, Salvatore-Campo- and Daniel Tommasi, *Managing Government Expenditure*, 1999.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, 2006.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi Ahmad. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta, 2006.

PROFIL PENULIS



Yulita Adilah

Penulis lahir di Siak pada tanggal 11 juli 2002 dan sekarang menetap di Provinsi Riau, Kecamatan Kandis tepatnya di Dusun Garut. Menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 10 Belutu pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 5 Kandis pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Kandis pada tahun 2017. Sekarang sedang menempuh studi strata satu semester enam di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan mengambil Program studi Akuntansi Syariah. Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi Pemerintahan dimulai sejak belajar mata kuliah Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2023.

Penulis memiliki pengalaman di bidang karya tulis, Sejak masuk organisasi kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Riset dan Karya Tulis (UKM-RKT) Batusangkar pada tahun 2021 silam. Tentunya dengan bekal ilmu dan pengetahuan serta pengalaman organisasi ini, yang membuat penulis tertarik untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang karya tulis. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi para pembaca tentunya dalam bidang Akuntansi Pemerintahan.

Email Penulis: yulitaadilah02@gmail.com

BAB 9

AKUNTANSI INVESTASI

Intan Asmaul Husna

Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Akuntansi Investasi

Investasi merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah dalam menginvestasikan uang dalam bentuk saham /membeli surat utang/obligasi untuk mencapai keuntungan/profit ekonomi atau sosial. Adapun yang telah dijelaskan di dalam PSAK 13 (1994) menjelaskan bahwa investasi adalah sebuah aset yang dipakai oleh perusahaan dengan memiliki maksud dan tujuan untuk *accretion of wealth* yang didistribusikan melalui hasil investasi yang dapat berupa bunga, royalti, dividen/keuntungan royalti dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam PSAP No. 6, investasi adalah sebuah aset yang memiliki tujuan agar bisa menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat baik dari segi bunga, dividen ataupun pendapatan/income dan memberikan manfaat sosial agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Nurmalia Hasanah, 2017)

Adapun manfaat ekonomi yang diperoleh yaitu dapat digunakan untuk memajukan pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi jika bentuk saham, maka dapat memperoleh pendapatan dividen/keuntungan. Sedangkan berinvestasi bentuk surat utang/obligasi maka dapat menghasilkan pendapatan bunga/*interest income*. Adapun manfaat sosial yang disinggung di dalam PSAP No. 6 yaitu menjelaskan bahwa kegunaan yang tidak bisa diukur secara langsung baik dengan satuan uang/rupee. Akan tetapi dapat memberikan dampak yang lebih terhadap pelayanan publik dari pemerintah terhadap masyarakat luas. (PSAP 06)

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Sebagaimana yang telah ditulis didalam PSAP No. 41 bahwa realisasi investasi public dapat dilakukan dengan cara penjualan, pengalihan hak berdasarkan peraturan pemerintah, dsb. Selisih antara keuntungan modal dan nilai buku investasi diakui atau dikreditkan ke laba. Kerugian karena pengalihan investasi. Keuntungan/kerugian pelepasan investasi.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan bahwa pendapatan dari penjualan investasi pengelolaan kas jangka pendek dicadangkan sebagai penerimaan kas pemerintah. Pendapatan dari penjualan investasi tersebut tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam Laporan Kegiatan Anggaran. Pendapatan ni termasuk dalam laporan arus kas operasi. Pada saat yang sama, pendapatan dari penjualan aset tetap diakui sebagai pendapatan keuangan. Investasi pemerintah hanya dapat disetujui untuk Sebagian dari investasi.apabila pengalihan hanya menyangkut Sebagian investasi.

PSAP No 6 Paragraf 42 menentukan bahwa jika perbedaan antara penghasilan dari pelepasan bunga dan jumlah akun harus diakui atau dialokasikan ke keuntungan/kerugian pelepasan bunga. Kemudian dapat disajikan dalam laporan kegiatan.

Daftar Pustaka

Assagaf, M. F. (2016). *AKuntansi Pemerintahan*.

Nurmalia Hasanah, A. F. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: IN MEDIA.

PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan standar akuntansi pemerintahan pernyataan no. 06

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

PROFIL PENULIS



Intan Asmaul Husna

Intan Asmaul Husna, lahir di Sungai Tarab pada tanggal 02 Maret 2000 anak ketiga dari tiga saudara. Sekarang menetap di Kabupaten Tanah Datar tepatnya yaitu di Jorong Lumbang Bapereng Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab. Menyelesaikan Pendidikan dasar di SD 14 Rao-Rao pada tahun 2007 dan melanjutkan di SMPN 2 Sungai Tarab pada tahun 2013, lalu melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Sungai Tarab pada tahun 2016, dan sekarang sedang menempuh studi strata satu semester delapan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan mengambil program studi Akuntansi Syariah. Ketertarikan penulis di dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah dimulai sejak belajar mata kuliah Akuntansi Pemerintah pada tahun 2023.

Sebelumnya penulis belum pernah mencoba untuk mengembangkan dalam hal melakukan penulisan buku, karena penulis hanya memiliki pengalaman di bidang seni. Setelah mencoba melakukan penulisan book chapter ini maka penulis memulai ketertarikan dalam hal menulis. Dan penulis mudah mudahan dalam waktu dekat sudah mampu menyelesaikan Pendidikan penulis dan melakukan wisuda pada bulan September nanti 😊

Email Penulis: intanasmaul02@gmail.com

BAB 10

ASET TETAP

Rinto Ariadi

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Aset tetap merupakan unsur penting dalam aktivitas perusahaan maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Aset tetap pada pemerintahan berperan penting dalam menghasilkan laba sedangkan pada pemerintahan berperan penting dalam menunjang operasional kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada biasanya aset tetap terdiri dari tanah, mesin, peralatan, gedung, segala bentuk bangunan dan aset tetap lainnya. Aset tetap tersebut memiliki manfaat dan fungsi masing-masing yang penting bagi pemerintahan. Adapun bentuk klasifikasi aset tetap antara lain:

1. Tanah, memiliki manfaat sebagai tempat berdirinya instansi pemerintah untuk melayani masyarakat.
2. Gedung atau bangunan, merupakan aset tetap tempat berlangsungnya aktivitas kegiatan kantor dan pelayanan publik dalam hal telah memenuhi sarana-prasarana kebutuhan pemerintahan.
3. Peralatan dan mesin merupakan sarana yang biasa digunakan pekerja yang umur ekonomisnya atau masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang bertujuan mempermudah pekerjaan agar memberikan hasil yang maksimal dalam pemerintahan. Contoh, Komputer, Proyektor, Meja dan Kursi, Printer, mesin foto Copy dan lain-lain.

- 3) Akumulasi penyusutan, Penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode yang digunakan, umur ekonomis, dan nilai yang tercatat bruto awal dan akhir pencatatan.
- 4) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- 5) Jumlah komitmen akuisisi aset tetap.
- 6) Mutasi aset tetap

Daftar Pustaka

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2017). *3 1,2,3. 12(07)*, 18–24.
- Akuntansi, S. (2016). *Neraca awal pemerintah pusat*.
- Ariana, R. (2016). *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. 3–33.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan (pertama)*. STAN Press.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. 83–97.
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf
- RAMIREZ, D.-R. D. L. C. D. E. P. E. LA, SÍNDROME, P. E. D. P. E. P. C., & AGUDO, R. (2019). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.

PROFIL PENULIS



Rinto Ariadi

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai sejak tahun 2017 silam hal tersebut membuat penulis memilih masuk Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 1 Batusangkar dengan memilih Jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL) dan berhasil lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan masih dalam pendidikan dengan Studi S1 di Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dimulai sejak tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi khususnya pada pengelolaan aset dan akuntansi syariah. Dan untuk mewujudkan karir profesional, penulis pun aktif sebagai aktivis dan penelitian dibidang akuntansi di bidang akuntansi peneliti telah mencoba mempelajari akuntansi secara syariah berharap dapat mengembangkannya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Penulis juga aktif dalam organisasi dan berharap kedepannya menjadi salah satu pemimpin dan penulis buku yang dapat membawa dampak positif di tengah masyarakat. Selain itu penulis juga tertarik pada pekerjaan proyek bangunan penulis juga memiliki keterampilan di bidang konstruksi bangunan dan juga berharap dapat melanjutkan S2 di prodi Teknik Sipil.

Email Penulis: rintoariadi0506@gmail.com

BAB 11

AKUNTANSI KEWAJIBAN & EKUITAS DANA

Suci Nurfalah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Kewajiban dan ekuitas dana merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sumber pendanaan kegiatan suatu entitas, baik itu untuk entitas swasta maupun pemerintahan. Seperihalnya entitas swasta pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendanai kegiatannya selain ekuitas dana pribadinya.

Selayaknya sebuah entitas pemerintah nantinya akan membuta laporan keuangan yang mana, di dalam laporan tersebut tentunya akan memuat di dalamnya pelaporan kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu di dalam bab ini nantinya akan dipaparkan apa itu kewajiban dan ekuitas pemerintah, dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk kedua elemen ini dalam akuntansi pemerintahan.

Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah akun utang yang timbul karena adanya transaksi pada masa lalu yang belum dibayarkan baik keseluruhannya maupun sebagiannya. Untuk menyelesaikan transaksi tersebut akan mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan sumber daya yang dimilikinya.

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi menggambarkan modal pemerintah yang di alokasikan pada aset tidak lancar selain dana cadangan, yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Untuk akun-akun yang termasuk kedalam ekuitas dana investasi yaitu:

- a. Dimasuk kan kedalam investasi jangka panjang. Yang mana akun tersebut menjadi lawan bagi investasi jangka panjang.
- b. Dimasuk kan kedalam aset lainnya. Yang mana akun tersebut menjadi lawan bagi aset lainnya.
- c. Dimasuk kan kedalam aset tetap. Yang mana akun tersebut menjadi lawan bagi aset tetap.
- d. Dana yang di sediakan untuk melunasi utang jangka panjang. Yang mana akun ini yang menjadi lawan dari semua akun utang jangka panjang.

3. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan menggambarkan modal pemerintahan yang dicadangkan yang ditujukan untuk tujuan yang telah dibuat sebelumnya yang mana sejalan dengan peraturan perundang-undangan. sesungguhnya dari ketiga kelompok ekuitas dana di atas, yang merupakan hasil transaksi adalah kas atau SiLPA. Adapun yang termasuk kedalam Ekuitas dana cadangan yaitu

- a. Dana cadangan pembangunan infrastruktu
- b. Dana cadangan yang digunakan untuk melunasi utang janka panjang
- c. Dana cadang untuk biaya impor

Daftar Pustaka

- Komisi Standar Akuntansi pemerintah (KSAP). (2021). *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). (2005). *Buletin Teknis standar akuntansi pemerintah No. 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). (2016). *Buletin Teknis No.22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua*. Jakarta: KSAP.
- Nurmalia, H., & Fuzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: iN MEDIA.
- Richard, E., Theodore, E., David, M., & dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Suci Nurfalah

Penulis yang bernama lengkap suci nurfalah lahir pada tanggal 18 oktober tahun 2001. Yang mana penulis merupakan anak tunggal dari keluarga yang sederhana. Pada tahun 2008 penulis memulai jenjang pendidikan pertamanya di SDN 31 balai labuah bawah, selanjutnya setelah lulus SD pad tahun 2014, penulis melanjut kan pendidikannya di bangku SMP yang mana penulis bersekolah di

SMPN 3 batusangkar, hingga selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku SMA yang mana penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1Btusangkar. Di bangku SMA ini lah penulis mulai tertarik dengan ilmu akuntansi yang mana mata pelajaran akuntansi merupakan salah satu matapelajaran favorit di SMA. Oelh karena itulah penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan dengan jurusan akuntansi syariah di UIN Mahmud Yunus batusangkar.

Pada kesempatan kali ini penulis di beri kesempatan untuk menyalurkan pengetahuanyan yang telah di pelajari selama ini dalam bentuk penulisan book Chapter ini, yang mana penulis berharap dengan penulisan book Chapter ini dapat membantu pembaca serta penulis sendiri dalam mempelajari bidang akuntansi khususnya akuntansi pemerintah.

Email Penulis: sucinurfalah18@gmail.com

BAB 12

PENYESUAIAN & KOREKSI KESALAHAN

Vivi Syafriyeni

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa: “Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.” Pada dasarnya pencatatan dalam akuntansi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada akuntansi umum. Begitu juga dalam mencatat penyesuaian dan koreksi kesalahan.

Dalam laporan keuangan akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dinyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas saldo akun di buku besar, yang dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian pada setiap akhir periode pelaporan. Hal itu bertujuan untuk menyesuaikan dan memutakhirkan saldo akun yang terdapat pada laporan keuangan yang bersangkutan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pencatatan dalam membuat jurnal, maka harus segera melakukan koreksi kesalahan pada saat kesalahan tersebut telah diketahui atau telah ditemukan. Pada hakekatnya penyesuaian dan koreksi kesalahan merupakan dua hal yang berbeda dimana penyesuaian terjadi dalam proses pencatatan akuntansi sedangkan koreksi kesalahan dilakukan setelah diketahui adanya kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Oleh karena itu pada bab 12 ini kita akan

peralatan) sedangkan Amortisasi digunakan pada aset tak berwujud.

Untuk lebih lanjut dapat dilihat secara ringkas pada gambar dibawah ini :



Gambar 12.1: Item-item yang perlu penyesuaian

Sumber : (Hamzah & Kustiani, 2014)

Berikut contoh Jurnal Penyesuaian :

a. Jurnal Penyesuaian untuk akun *Accrual*

Pendapatan

(Db.)Piutang	xxx
(Cr.)Pendapatan	xxx

Beban

(Db.)Beban	xxx
(Cr.)Utang Beban	xxx

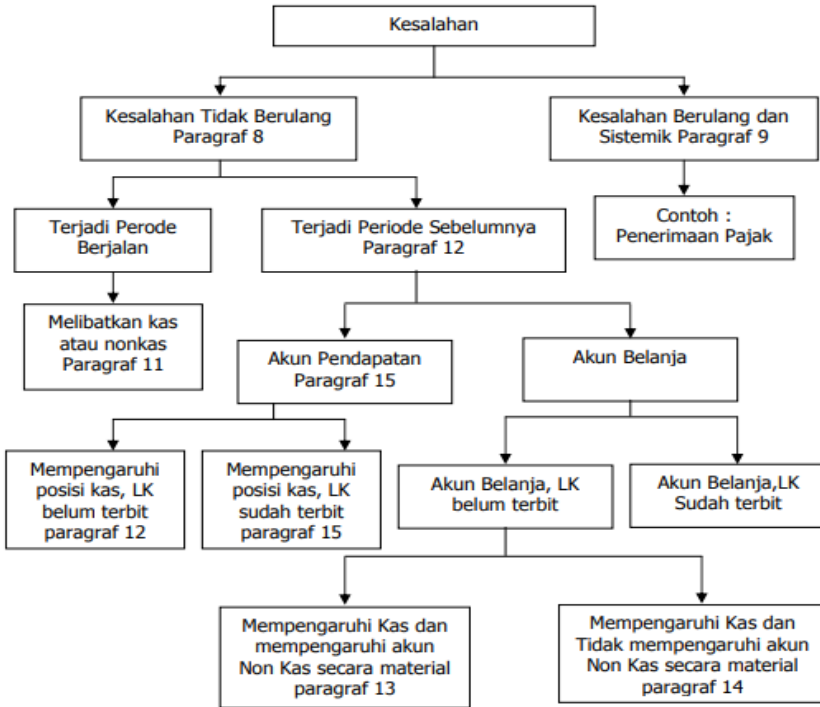
b. Jurnal Penyesuaian untuk akun *Defferal*

Pendapatan

(Db.)Pendapatan diterima dimuka	xxx
(Cr.)Pendapatan	xxx

Beban

(Db.)Beban	xxx
(Cr.)Beban dibayar dimuka	xxx



Gambar 12.2 : pengelompokan jenis-jenis kesalahan

Sumber : Perbup Gunungkidul No. 16 tahun 2009

1. Kesalahan yang Tidak Berulang

Kesalahan ini dapat dipahami sebagai kesalahan yang tidak akan terjadi secara berulang-ulang dikemudian hari atau kesalahan yang jarang terjadi, kesalahan ini juga dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Terjadi pada periode berjalan

Merupakan kesalahan yang terjadi dan diketahui pada periode yang sama atau suatu kesalahan yang diketahui pada saat periode pelaporan tersebut belum berakhir dan tidak terjadi secara berulang, yang dapat berpengaruh pada nilai kas ataupun yang tidak berpengaruh pada nilai kas, dimana kemudian perlu dilakukan pembetulan/koreksi pada akun yang berkaitan dengan kesalahan tersebut.

Contoh 1: Koreksi dalam periode berjalan yang berpengaruh pada nilai kas;

Daftar Pustaka

- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Rusmana, O., Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 tahun 2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat
- Perbup Gunungkidul No. 16 tahun 2009. Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kebijakan Akuntansi 12: <https://peraturan.bpk.go.id>

PROFIL PENULIS



Vivi Syafriyeni

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2018 silam., Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Solok dengan memilih Jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga dan berhasil lulus pada tahun 2020. Yang menjadi alasan ketertarikan tersebut adalah karena adanya motivasi dan support dari

kedua orang tua yang mendorong penulis untuk menjadi seorang akuntan muda. Untuk mewujudkan impian itu, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2020. Dimana penulis tidak hanya belajar lebih dalam tentang ilmu akuntansi tetapi juga belajar ilmu agama islam, agar penulis dapat menjadi akuntan yang tidak hanya berintegritas tetapi juga bertaqwa kepada Allah SAW.

Selain menepuh pendidikan formal, penulis juga telah mengikuti pelatihan nonformal selama duduk dibangku perkuliahan, yaitu dengan mengikuti kegiatan organisasi, dan juga turut aktif dalam menulis buku, jurnal ataupun artikel dengan harapan kelak dapat membanggakan kedua orang tua serta dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: vivisyafriyeni@gamil.com

BAB 13

PENGANGGARAN

PEMERINTAH PUSAT & DAERAH

Tiffany Chatarine Putri

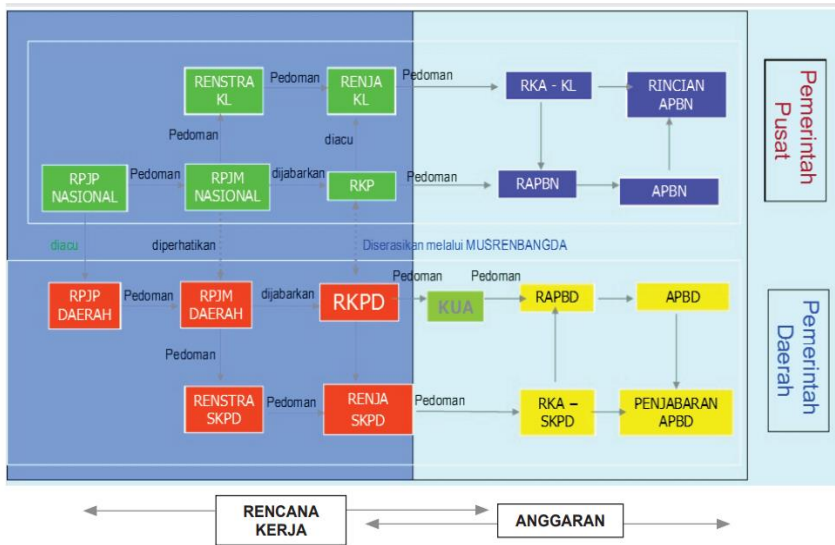
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Keuangan Negara

Untuk melaksanakan pemerintahan di Indonesia, maka diperlukan suatu sistem yang mengatur seluruh kegiatan pemerintahan yang berlangsung untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Uang atau harta merupakan suatu hal yang sangat sensitif, maka dari itu Keuangan Negara butuh dikelola dan diatur dalam suatu sistem yang baik dan profesional, agar tidak terjadi yang namanya penyelewengan di pemerintahan. Untuk menghindari hal ini, tentunya Indonesia memiliki sistem pengelolaan keuangan pemerintahan pusat (Negara) dan daerah yang mengatur arus dari keuangan dan aset negara yang ada. Dimana hal ini tentunya diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang artinya pengelolaan keuangan Negara haruslah dilaksanakan secara baik, sesuai aturan, dan penuh tanggung jawab, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keuangan Negara adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Negara (Rusmana, dkk, 2017).

Penganggaran Pemerintah Pusat & Daerah

masyarakat dan asosiasi profesi, pebisnis atau masyarakat yang ada di sektor swasta, dan juga kelompok peduli anggaran yaitu kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan anggaran (Hasanah & Fauzi, 2017).



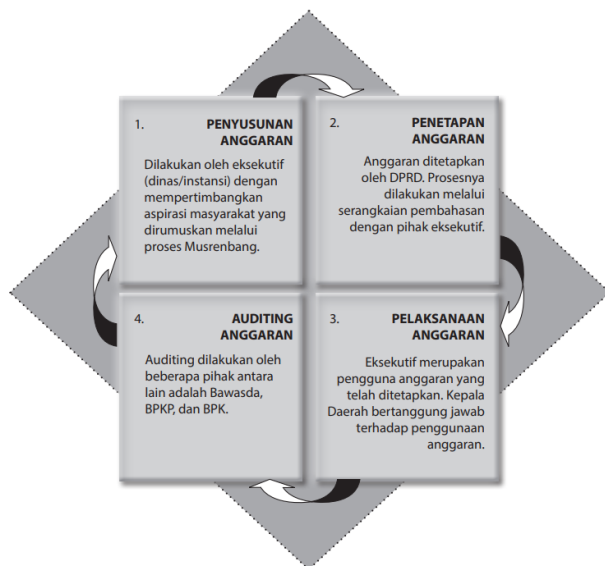
Gambar 13. 2 : Alur Perencanaan Program & Penganggaran

Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

Siklus Anggaran Pemerintah Daerah

Umumnya anggaran, baik anggaran dari suatu organisasi, perusahaan, ataupun pemerintahan, itu dibuat melalui beberapa tahap atau siklus yang dilaksanakan sebelum anggaran tersebut jadi/ada/selesai, siklus-siklus tersebut diantaranya, sebagai berikut :

1. Tahap persiapan anggaran.
2. Tahap persetujuan anggaran.
3. Tahap realisasi anggaran.
4. Tahap pelaporan anggaran.
5. Tahap evaluasi anggaran



Gambar 13.3 : Proses dan Siklus Anggaran Pemerintah Daerah

Sumber : UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 15 Tahun 2004

Siklus-siklus anggaran pemerintah daerah ini di setiap Negara pastinya berbeda, akan tetapi tujuan dan fungsinya tentu saja sama. Di Indonesia tahapan-tahapan ini tentunya mempunyai siklus-siklus yang berbeda dengan rentang waktu tertentu. Tahapan pertama dan kedua yaitu tahap Penyusunan dan Penetapan Anggaran, tahap ini memerlukan waktu selama 12 bulan. Tahapan ketiga yaitu tahap Pelaksanaan Anggaran, memerlukan waktu selama 12 bulan. Tahapan terakhir yaitu tahap keempat adalah tahap Auditing Anggaran, memerlukan waktu selama 6 bulan (Rusmana, dkk, 2017).

Pelaksanaan APBN dan APBD

Pelaksanaan APBN dan APBD adalah suatu proses yang mulai dilaksanakan pemerintah dari mulai tahap pengesahan APBN yang sesuai dengan undang-undang dan pelaksanaannya dituangkan dalam keputusan Presiden dan APBD yang sesuai dengan peraturan daerah di akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan

Daftar Pustaka

- Effendi, S. (2021). *Tata Kelola Keuangan Negara*. Batam : CV. Batam Publisher.
- Hasanah, N. & Fauzi, A. (2017). *AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. Bojongsukur-Gunung Putri-Bogor : In Media.
- Keuangan Negara, Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (2003). Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (2004). Jakarta : Sekretariat Negara.
- Rusmana, O., Setyaningrum, d., Yuliansyah, Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010 (2010). Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PROFIL PENULIS



Tiffany Chatarine Putri

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2018 silam. Hal tersebut muncul dalam diri penulis ketika penulis berada diposisi kelas 3 SMA di Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Batusangkar) dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan berhasil lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi untuk melanjutkan ketertarikannya terhadap bidang akuntansi dan berhasil diterima pada studi S1 di program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2020.

Buku ini merupakan pengalaman perdana Penulis dalam bidang menulis buku, dengan harapan buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi diri penulis pribadi dan juga bagi para pembaca, bangsa, dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: tifannycharinep@gmail.com

BAB 14

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT & DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Delmeta Sari

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Sistem akuntansi pemerintah pusat merupakan kumpulan proses manual dan terkomputerisasi mulai dari pendataan, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan posisi keuangan dan penyelenggaraan keuangan, hal ini Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. SiAP dan SAI adalah bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. SAI adalah proses data transaksi keuangan dan barang yang dilakukan oleh kementerian Negara/Lembaga, siAP adalah proses data transaksi kas pada Negara dan akuntansi umum.

Suatu penerapan metode pada Akuntansi yang terdapat pada pemerintahan, seperti pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah harus diterapkan dalam peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan resmi oleh pemerintah. Dalam suatu sistem akuntansi pemerintah harus bersifat akuntabilitas dan transparansi, karena seluruh dana yang telah digunakan berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan adanya penyusunan sistem akuntansi dapat mempermudah dalam pengelolaan kebenaran transaksi dalam

terdiri atas aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan arus kas masuk dan keluar non anggaran yang terjadi dalam periode tertentu, laporan arus kas menunjukkan seluruh informasi atas transaksi tersebut.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan mengenai bagaimana nilai atas sesuatu yang telah disajikan dalam Laporan perwujudan Anggaran.

Daftar Pustaka

- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: CV.Berkah Utami.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
- Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia No.22/PMK.05/2022 Tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat bahwa
- peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat
- Yusra, M. (2016). *Modul Akuntansi Sektor Publik Universitas Malikussaleh*. Lhokseumawe.

PROFIL PENULIS



Delmeta Sari

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut muncul ketika penulis menduduki bangku kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Tualang dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan tujuan agar dapat meneruskan ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dan berhasil diterima pada studi S1 di prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2020.

Penulis saat ini sedang mencoba pengalaman baru yaitu dengan membuat suatu karya berupa buku, yang mana ini merupakan pengalaman pertama bagi penulis. Selain itu, penulis juga memiliki harapan bahwa dengan adanya buku ini maka dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, semoga buku ini bisa menjadi referensi bagi penulis selanjutnya.

Email Penulis: delmetasari07@gmail.com

BAB 15

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH & DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dini Wulandari

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan sistem yang sudah mendapatkan perhatian sejak zaman Reformasi pada tahun 1998. Karena sudah mendapatkan kebijakan dari pemerintah untuk mereformasi berbagai hal dan termasuk kedalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Abdul Halim, 2008) reformasi dilakukan pada awal penggantian UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang keuangan negara dan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus masyarakat atas dasar penilaian dari masyarakat tersebut yang mana serasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pendapat yang mendasari perlunya diadakan otonomi daerah karena akan terjadinya perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri, kondisi di dalam negeri, masyarakat menginginkan keterbukaan dan mampu memecahkan masalah jika terjadi sesuatu. Disisi lain, kondisi

tertentu serta pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh fungsi perbendaharaan.

Pelaksanaan anggaran pemerintah Indonesia dapat dilakukan oleh dua fungsi, ialah perbendaharaan dan fungsi pelaksanaan anggaran. Objek pelaporan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan dapat menyusun laporan keuangan. Semetara objek akuntansi dapat dibuktikan dalam satuan kerja dari mulai tingkat kementerian untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah seperti dinas/lembaga sampai kepada kecamatan.

Dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan akuntansi realisasi anggaran menerapkan akuntansi hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang, yang mana dinyatakan yang dapat berperan dalam kantor pusat adalah entitas pelaporan, dan yang berperan sebagai kantor cabang adalah SKPD sebagai peringkat daerah.

Struktur Laporan Realisasi APBD

Menurut (Nurmalia H & Achmad F, 2017) struktur laporan realisasi APBD yaitu:

Tabel 15.1 Struktur Laporan Realisasi

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Pendapatan:		
Belanja operasional	Cccc	Cccc
Pendapatan dana perimbangan	Cccc	Cccc
Pendapatan lain-lain	Cccc	Cccc
Belanja:		
Belanja operasional	Cccc	Cccc
Belanja modal	Cccc	Cccc
Belanja lainnya	Cccc	Cccc
Surplus/defisit	Cccc	Cccc
Pembiayaan:		
Penggunaan SILPA	Cccc	Cccc
Penggunaan pinjaman	Cccc	Cccc
Penjualan aktiva	Cccc	Cccc
Penggunaan dan cadangan	cccc	cccc

Sumber: diolah penulis

Daftar Pustaka

- Abdul H (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat
- BPK. (2015). IHPS 1 Tahun 2015, Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester 1 Tahun 2015
- Cik Basir (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Akrual Entitas Akuntansi. Jakarta. Prenada Media
- Majid J (2019). Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan. Pusaka Almaila
- Nurmalia H & Achmad F (2017). Akuntansi Pemerintah. Bogor. In Media
- Riyanto & Agus P (2015). Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta.

PROFIL PENULIS



Dini Wulandari

Lahir pada tanggal 09 Februari 2002, di Jakarta Provinsi DKI Jakarta. Penulis merupakan Anak ke dua dari tiga bersaudara dan dari pasangan Pak Sukarni dan Bu Wirda. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 14 Balai Baru pada tahun 2008 dan tamat 2014 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri 15 Tanjung Emas dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat di MTS, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 01 Padang Ganting dan tamat pada tahun 2020. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah.

Email Penulis: diniw7457@gmail.com

BAB 16

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN

Diki Arlanda

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Upaya untuk mengaplikasikan sistem pengendalian internal pemerintahan pada kementerian, Lembaga dan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintahan adalah sistem pengendalian yang dilakukan secara keseluruhan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan SPIP yaitu memberikan keyakinan untuk mencapai efektivitas dan efisien, penyelenggaraan pemerintah, pelapor keuangan, mengamankan aset negara, dan patuh kepada peraturan undang-undang. Penerapan Sistem pengendalian intern dapat didahului dengan pembangunan falsafah manajemen resiko, penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, bantuan dan risiko penilaian, pelaksanaan kegiatan pengendalian, mekanisme pembangunan informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan resiko aktual dan biaya yang ditimbulkan.

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebuah sistem yang digunakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintahan yang ada di pusat dan yang ada pada di daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan bersamaan dan menjadi bagian terkonsolidasi dari kegiatan-kegiatan pemerintah, selain melaksanakan peraturan

Daftar Pustaka

Pedoman penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di perangkat daerah, Nomor 55 tahun 2019 tentang pedoman penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di kabupaten paser.

Tadeko, 2019. *Pengaruh sistem pemerintahan terhadap kualitas pelayanan pada suatu kerja perangkat daerah*. Dikutip dari muryanitadeko@yahoo.co.id

Novianty, Theresia A.2012. Analisis penerapan sistem pengendalian intern

Riska, no,3 september 2013, hal 1212-1220. Penerapan SPI dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM pada PT.BRI (persero) TBK Manado.

,

PROFIL PENULIS



Diki Arlanda

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2018 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Progresif Kota Batusangkar dengan memilih Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dengan mengambil jurusan yang sama yaitu Akuntansi Syariah dan saat ini sudah berjalan 3 tahun yaitu semester 6. Penulis memiliki kepakaran dibidang fotografer dan untuk mengasah bakat tersebut penulis bergabung pada salah satu organisasi di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, penulis juga menjabat sebagai pimpinan umum sebuah Lembaga yang bernama Idealita yang mana organisasi ini bergerak di bidang jurnalis dan fotografi, penulis membuat buku ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: arlandadiki0@gmail.com

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan bagian disiplin ilmu akuntansi yang terus berkembang di Indonesia demi penyempurnaan sebagai acuan. Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan implementasi ilmu akuntansi pada bidang *public finance*, terutama untuk tahapan pada pelaksanaan anggaran (*budget execution*), sehingga segala hasil yang ditimbulkan karena bersifat tentatif ataupun permanen/tetap pada setiap tingkatan dan semua unit Pemerintahan. Masyarakat akan meminta transparansi dan menuntut akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara. Peran akuntansi pemerintah merupakan peran penting untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab yaitu: Sejarah Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Konvergensi Akuntansi Pemerintahan; Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Keuangan Negara dan Pencatatannya; Laporan Keuangan Pemerintah; Persamaan Dasar Akuntansi dan Proses Akuntansi Pemerintah; Akuntansi Pendapatan; Akuntansi Belanja; Akuntansi Investasi; Akuntansi Aset Tetap; Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas Dana; Penyesuaian dan Koreksi Kesalahan; Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah; Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

